ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SMART GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN DATA TERINTEGRASI DESA

(Studi di Kantor Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)

ANALYSIS OF SMART GOVERNANCE POLICY IMPLEMENTATION IN REALIZING INTEGRATED VILLAGE DATA

(Study at the Pinggirpapas Village Office, Kalianget District, Sumenep Regency)

Oleh :

Fatmawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura

E-mail : Mikydoll37@gmail.com

Abstract

In 2021 the Sumenep Regent issued a policy, namely Sumenep Regent Regulation Number 44 of 2021 concerning Village Information Systems Data Integration of Empowered Village (DIGDAYA) to make Sumenep Regency one of the smart cities capable of making the village smart and integrated. This policy is more into the dimension of smart governance, through a website Data Integration of Empowered Village (DIGDAYA) which is implemented in all village in Sumenep Regency. One of the village that is expected to be able to implement smart governance is Pinggirpapas Village and Pinggirpapas Village is a village that has the population is quite large. However, theret is a problem, namely the condition of the people of Pinggirpapas Village, which is different from other regions. Pinggirpapas Village has a fairly large population, but the people of Pinggirpapas Village have a minimal level of educationand jobs that are not good. As well as a poor level of understanding of information technology. From these problems raises a question how to analize the implementation of smart governance policies in realizing integrated village data in districts Sumenep, Which aims to find out the analysis of the implementation of smart governance policies in realizing village integrated data in Pinggirpapas Village. The problems research were analiyzed using implementation analysis theory according to Donald Van Meter & Carl Van Horn (Duadji, 2017), *using qualitative research methods. It reaulted thet, information related to smart governance has not been conveyed to the public*

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

and no development has been carried out. However, they already have good enough resources even though the quality of human resources eveb through the quality of resources nad commitment of the implementers in Pinggirpapas Village is good enough to support the implementation of smart governance. The implementers were not good and the control exercised by the Head og Pinggirpapas Village was still not optimal. As well as the community was not involved in the implementation of smart governance in the Pinggirpapas Village, various mappings related to interesting Village data and the smart governance program were still not optimal.

Keywords: *Smart village, Smart governance, Information and communication technology, Village data integration.*

Abstrak

Pada tahun 2021 Bupati Sumenep mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 tahun 2021 tentang Sisitem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) untuk menjadikan Kabupaten Sumenep salah satu kota cerdas yang mampu menjadikan Desa menjadi cerdas dan terintegrasi. Kebijakan tersebut lebih ke dimensi *smart governance*, dengan malalui sebuah *website* Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) yang di implementasikan di seluruh Desa di Kabupaten Sumenep. Salah satu Desa yang diharapkan mampu untuk mengimplementasikan *smart governance* adalah Desa Pinggirpapas serta Desa Pinggirpapas merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Namun terdapat masalah, yakni kondisi masyarakat Desa Pinggirpapas yang berbeda dengan daerah lain. Desa Pinggirpapas memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak namun masyarakat Desa Pinggirpapas memiliki tingkat pendidikan yang minim dan pekerjaan yang kurang baik. Serta tingkat pemahaman terhadap teknologi informasi yang kurang baik. Dari permasalah tersebut menumbuhkan sebuah pertanyaan bagaimana analisis implementasi kebijakan *smart governance* dalam mewujudkan data terintegrasi Desa di Kabupaten sumenep, yang bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi kebijakan *smart governance* dalam mewujudkan data terintegrasi Desa di Desa Pinggirpapas. Permasalahan dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teori analisis implementasi menurut Donald Van Meter & Carl Van Horn (Duadji, 2017), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dihasilkan bahwa, informasi terkait *smart governance* belum tersampikan ke masyarakat dan belum ada pengembangan yang dilakukan, Namun sudah memiliki sumber daya yang cukup baik meskipun kuliatas SDM masih kurang, serta respon dan komitmen para pelaksana di Desa Pinggirpapas cukup bagus untuk mendukung implementasi *smart governance*. Akan tetapi, komunikasi, pelatihan dan sosialisasi yang

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

dilakukan oleh Pemerintah Desa Pinggirpapas kurang baik dan maksimal. Keahlian para pelaksana kurang baik dan kontrol yang dilakukan oleh Kepala Desa Pinggirpapas masih kurang maksimal. Serta masyarakat tidak terlibat dalam implementasi *smart governance* di Desa pinggirpapas, berbagai pemetaan terkait pengintegrasian data Desa dan program *smart governance* masih kurang maksimal.

Kata kunci: *Smart village, Smart governance,* Teknologi informasi dan komunikasi, Integrasi data Desa.

1. PENDAHULUAN

Perbaikan kondisi Desa sangatlah perlu untuk dilakukan, sebagai bentuk pemberdayaan populasi di Indonesia. Upaya perbaikan Desa dapat dilakukan dengan adanya perencanaan dan pengelolaan Desa secara berkelanjutan, dengan memaksimalkan berbagai sumberdaya yang ada. Perbaikan dapat dimulai dengan adanya transformasi Desa Tradisional menjadi sebuah Desa yang cerdas. Adanya penggunaan teknologi yang baik dan tepat guna dalam Desa dapat menjadi suatu keberhasilan yang mampu memperbaiki Negara (Pers, 2017).

Menanggapi perkembangan sistem infomasi dan komunikasi pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijkan yaitu undang-undang pada tahun 2014 nomor 6 tentang Desa (Indonesia, 2014). Sehingga untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan untuk mendukung Program *Smart Village* agar terimplementasi di Kota Sumenep, Bupati Sumenep mengeluarkan sebuah Kebijakan yakni Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) (Sumenep, 2021).

Implementasi konsep *Smart Village* di Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kota Sumenep melakukan penerapan pada dimensi *Smart Governance*. *Smart Governance*, menyangkut mengenai pelayanan elektronik dan media sosial dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan warga masyarakat dalam manajemen publik dan transparansi proses pengambilan keputusan terkait *smart governance* (Santoso et al., 2018). Sebagai usaha mewujudkan *Smart Governance* yang mampu mewujudkan sebuah data terintegrasi desa pada tahun 2021 Bupati Sumenep meluncurkan sebuah Aplikasi DIGDAYA yang merupakan sebuah inovasi baru dalam penerapan teknologi (Nolesa, 2021).

Adanya Aplikasi DIGDAYA tersebut, akan memudahkan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran dalam bentuk metode

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

perencanaan partisipatif, analisis masalah dan potensi desa yang berdampak pada penyusunan anggaran dan belanja Desa. Aplikasi ini juga mampu mempercepat proses pelayanan Desa (Nolesa, 2021). Implementasi *Smart Governance* di Kabupaten Sumenep sudah mencakup banyak Desa, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti memilih dan tertarik dengan satu Desa yaitu Desa Pinggirpapas.

Desa Pinggirpapas merupakan Desa yang cukup besar, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.340 jiwa (Pinggirpapas, 2021). Masyarakat Desa Pinggirpapas memiliki mata pencaharian mayoritas sebagai pentani garam sebanyak 1051 jiwa, masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih sedikit, sebanyak 20 jiwa, serta banyak masyarakat Desa Pinggirpapas yang belum bekerja, sebanyak 1090 jiwa dari jumlah penduduk. Tingkat pendidikan di Desa Pinggirpapas kurang baik, karena masih banyak masyarakat yang belum menempuh pendidikan sama sekali yakni sebanyak 1.571 jiwa dari jumlah penduduk. Serta jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi di Desa Pinggirpapas sangatlah minim, yaitu sebanyak 205 jiwa dari jumlah penduduk. Sementara penduduk yang hanya tamat pendidikan SD, SLTP, ataupun SLTA sebanyak 2.527 jiwa.

Masyarakat Desa Pinggirpapas banyak yang kurang paham dengan teknologi informasi dan komunikasi. Serta banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih memilih bekerja di luar Kota Sumenep. Sehingga dari permasalah kondisi masyarakat tersebut peneliti memunculkan sebuah rumusan terkait analisis implementasi kebijakan *smart governance* dalam mewujudkan pengintegrasian data desa di Kantor Desa Pinggirpapas.

2. TINJAUAN TEORITIS

Penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topic yang sama dengan penelitian ini, yaitu 1.) Elida Suci Hermayanti dan Teguh Yuwono (Hermayanti & Yuwono, 2020), Implementasi *Green Smart Village* di Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Desa Banyumas Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali), 2.) Sukarso, Niken Paramarti Dasuki, dan Sendy Noviko (Niken Paramarti Dasuki, 2021). Model Desa Cerdas Manusiawi (*Humanized Smart Village*): Study Kasus di Desa Kotayasa dan Desa Karanggitung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, 3.) Eno Novita Maharani dan Dewi Sekar Kencono (Maharani & Kencono, 2021). Penerapan *Smart Governance* Dalam *Smart Village* di Kelurahan Dligo, Kabupaten Bantul, 4.) Mohammad Andik Juliantoro, Robby Darwis Nasution, Jusuf Harsono, Ekapti

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Wahjuni Dj (Juliantoro et al., 2022), Penerapan *Smart Village* Di Wilayah Pinggiran Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dan 5.) Hendrika Wey, Cynthia E. V. Wuisang, dan Julianus A. R. Sondakh (Way et al., 2022). Evaluasi Penerapan Konsep Kelurahan Cerdas (*Smart Village*) di Kota Manado.

Kebijakan Publik

Sesuai konsep filosaofis, kebijakan merupakan rangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan suatu produk kebijakan yang dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanismenya dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya (Tahir, 2015).

Analisis Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Kasmad, 2013), analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu identifikasi yang dilakukan terhadap berbagai variable yang mempengaruhi tujuan dari proses implementasi yang dilakukan dapat tercapai.

Analisis implementasi kebijakan model *Top-Down*

Model *Top-Down* merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadikan implementasi berhasil. Pendekatan ini menggunakan logika berfikir, dimana proses implementasi kebijakan ditentukan dari atas yang kemudian dilakukan sebuah pemetaan ke bahwa agar dapat melihat keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kebijakan (Duadji, 2017). Menurut Donald Van Meter & Carl Van Horn, analisis implementasi kebijakan menjadi suatu penilaian atas kinerja suatu kebijakan yang ada dan yang sedang di implementasikan di suatu Daerah. Kinerja kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1.) Standard (ukuran dasar) dan tujuan, faktor ini berkaitan dengan sejauhmana standard dari suatu kebijakan yang di implementasikan dapat terealisasikan.
2.) Sumber-sumber kebijakan, hal ini berkaitan dengan dana, SDM, dan fasilitas yang tersedia atau yang ada dalam proses implementasi kebijakan.
3.) Aktivitas-aktivitas pelaksanaan dan komunikasi antar organisasi (*Interorganizational communication and enforcement activities*), Ukuran dan tujuan kebijakan tidak akan bisa tercapai kecuali kalau hal tersebut dikomunikasian dengan jelas, sehingga implementor dapat memahami apa yang diharapkan dari sebuah kebijakan yang akan mereka laksanakan.

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

4.) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, terkait dengan komunikasi dari standard aturan kebijakan yang di implementasikan sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai alat ukur pengawasan, serta berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proses implementasi.
5.) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
6.) Sikap pelaksana, berkaitan dengan persepsi pelaksana atas masalah yang ada dan terjadi, standard dan tujuan serta sejauhmana pertentangan terjadi terhadap kepentingan pelaksana kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Aanalisis Implementasi Kebijakan Model Top-Down, menurut Donald Van Meter & Carl Van Horn (Duadji, 2017) variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan 1.) Standard (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan; 2.) Sumber-sumber kebijakan; 3.) Komunikasi anatar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; 4.) Karakteristik badan pelaksana; 5.) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik; dan 6.) Sikap pelaksana.

Sumber Data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data melalui Data Primer dan Data Sekunder :

a. Data Primer, yaitu wawancara-wawancara yang dilakukan dengan ketiga subjek penelitian, yaitu informan kunci adalah Kepala Desa Pinggirpapas, informan utama adalah para operator Desa Pinggirpapas, dan informan pendukung adalah masyarakat Desa Pinggirpapas.
b. Data Sekunder, Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar berupa dokumen Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Desa Data Intergrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) di Kabupaten Sumenep. Terdapat data sekunder lain yang diperolah melalui artikel-artikel tentang *Smart village* dan *smart governance* yang berupa website DIGDAYA, baik yang ditulis langsung oleh para pengambil kebijakan terkait permasalahan maupun pengamatan langsung seputar permasalahan yang sampai sekarang masih berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi berperanserta, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Serta menggnakan teknik analisis data dengan menggunakan model analisis data Miles and Huberman. Miles nad Huberman (Sugiyono, 2020), yaitu Data *Collection*/Pengumpulan Data, Data *Reduction*/Reduksi Data, Data

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Display/Penyajian Data, dan *Conclusion Drawing and Verification*/Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standard (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan

Partisipasi warga di Desa Pinggirpapas dalam implementasi *smart governance* tidak dilakukan dengan baik, informasi terkait implementasi program *smart governance* belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat. transparansi publik yang dilakukan di Desa Pinggirpapas juga belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Informasi yang dapat diakses oleh publik belum dapat diakses dengan baik, karena informasi yang tersedia dalam *website* dari program *smart governance* belum jelas dan tidak terbaru (tidak lengkap).

Gambar informasi publik dalam website DIGDAYA Desa Pinggirpapas

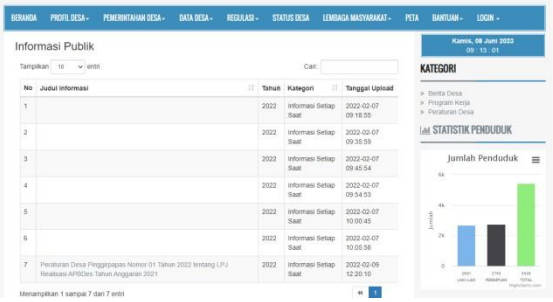

Sumber: Website Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA), 2023

Pemanfaatan TIK yang tidak maksimal di Desa Pinggirpapas dilihat melalui tidak adanya pengembangan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan program *smart governance* yang berupa wesite DIGDAYA. Serta tidak adanya pengembangan atau penggunaan layanan mandiri yang ada dalam *website* DIGDAYA terhadap masyarakat Desa Pinggirpapas.

Sumber-sumber kebijakan

Sumber daya manusia (SDM) yang menjadi salah satu sumber daya penting dalam implementasi sudah tersedia dengan baik namun belum mampu memiliki kualitas yang bagus dan maksimal dalam bidang teknologi informasi komunikasi serta dalam pengoperasian sebuah *website*, mereka hanya memiliki kemampuan dalam bidang tersendiri. Sumber daya berupa dana yang dimiliki oleh Desa Pinggirpapas dalam implementasi *smart governance* disesuaikan dengan petunjuk yang ada dan dengan keterbatasan yang ada. Dana yang digunakan dalam implementasi *smart governnace* berasal dari Dana Desa. Serta Operator Desa mendapatkan gaji yang cukup dan sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, yang berasal dari Dana Desa.

Fasilitas yang disediakan oleh Desa Pinggirpapas berupa laptop yang disediakan untuk setiap operator dan jaringan wifi yang dapat diakses dengan mudah oleh para pelaksana namun terkadang mengalami kelemotan pada jaringan. Akan tetapi, sumber daya pendukung yang cukup tersebut belum

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

diseimbangi oleh adanya sumber daya manusia yang cukup baik. Sehingga sumber daya yang dimiliki oleh Desa Pinggirpapas belum mampu memiliki hasil guna dan daya guna.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Penyampaian informasi atau komunikasi antar organisasi dilakukan melalui sosialisasi secara online dan melalui pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Namun proses penyamian informasi terkait program *smart governance* yang di implementasikan belum memiliki tindak lanjut dan belum dapat dipahami secara baik oleh Pemerintah Desa. Pemahaman yang dimiliki oleh para pelaksana terkait *smart governance* dan teknologi informasi komunikasi Desa Pinggirpapas terbatas dan hanya seputar tentang berbagai data saja.

Pelatihan yang dilakukan di Desa Pinggirpapas berjalan hanya satu hari, yang dilakukan hanya sebatas pengenalan terkait *website* dari program *smart governance*. Ketidak pahaman para pelaksana di Desa Pinggirpapas disebabkan oleh tingkat pelatihan yang dilakukan tidak maksimal, tidak dilaksanakan pelatihan secara menyeluruh. Tidak ada sosialisasi yang dilakukan dalam menyampaikan informasi terkait program *smart governance* kepada masyarakat Desa Pinggirpapas.

Karakteristik badan pelaksana

Para operator belum memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang teknologi informasi yang cukup masksimal untuk mendukung implementasi *smart governance* di Desa pinggirpapas. Kepala Desa belum maksimal pula dalam mengontrol tewujudnya dan suksesnya implementasi *smart governance* di Desa Pinggirpapas. Kontrol yang dilakukan hanya sebatas laporan tentang berbagai data yang di imput ke dalam *website* dan yang dikerjakan oleh para pelaksana.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Keterlibatan masyarakat Pinggirpapas dalam implementasi *smart governance* belum ada. Hal tersebut disebabkan oleh, proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pinggirpapas hanya melalui pihak perwakilan RT. Namun, proses sosialisasi yang dilakukan terdapat keambiguan dikarena adanya penyataan yang berbeda antara pihak Kepala Desa Pinggirpapas dengan pihak RT. Pihak kepala Desa menyatakan telah dilakukan sosialisasi, akan tetapi pihak RT membantah pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi terkait kebijakan *smart governance* yang berupa *website* DIGDAYA tersebut.

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Pemetaan sosial dan ekonomi dalam website yang dilakukan di Desa Pinggirpapas untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan kurang maksimal. Pemetaan sosial dan ekonomi yang dilakukan di Desa Pinggirpapas hanya sebatas melalui data yang ada dan diterima oleh Pemerintah Desa.

Sikap pelaksana

Para pelaksana di Desa Pinggirpapas memiliki respon yang baik terhadap program *smart governance* yang di implementasikan di Desa Pinggirpaapas. Para pelaksana menyambut baik adanya implementasi *smart governance* di Desa pinggirpapas. Serta para pelaksana memiliki komitmen yang cukup baik untuk meningkatkan dan mengembangbangkan *website* DIGDAYA berdasarkan atas indikator *smart governance* di Desa Pinggirpapas untuk kedepannya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep mengenai analisis implementasi kebijakan *smart governance* dalam mewujudkan data terintegrasi desa, yang mengacu pada teori Analisis Implementasi Kebijakan. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

a) Standard (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan

Indikator *smart governance* yakni partisipasi warga, transparansi publik, dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan di Desa Pinggirpapas belum secara baik dilakukan, yang disebabkan oleh keahlian operator dalam mengoperasikan *website* dan menggunakan TIK belum cukup baik serta terdapat kendalam jaringan yang menjadi penghambat pengoperasian *website* di Desa Pinggirpapas. Hal tersebut menyebabkan, tidak terwujudnya pengintegrasian data Desa di Desa Pinggirpapas.

b) Sumber-sumber kebijakan

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Pinggirpapas sudah cukup memadai dalam segi sumber daya manusia (SDM) dan faislitas pendukung berupa perangkat elektronik serta jaringan wifi. Namun, sumber daya manusia di Desa Pinggirpapas belum memiliki kualitas yang baik dalam memahami website DIGDAYA dan kehalian dalam bidang teknologi informasi komunikasi untuk mendukung implementasi kebijakan *smart governance*.

c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Daerah melalui sosialisasi secara online belum mampu dipahami secara baik oleh Pemerintah Desa dan tidak ada tindak lanjut terkait kebijakan *smart governance* yang di implementasikan di Desa Pinggirpapas. Pelatihan yang dilakukan terhadap para operator di Desa Pinggirpapas hanya dilakukan satu kali dan sebatas pengenalan website saja. Serta sosialisasi terhadap masyarakat Desa Pinggirpapas terkait implementasi *smart governance* belum dilakukan oleh Pemerintah Desa Pinggirpapas.

d) Karakteristik badan pelaksana

Keahlian para operator dalam bidang teknologi informasi komunikasi di Desa Pinggirpapas belum cukup baik untuk menjalankan program *smart governance* di Desa Pinggirpapas. Hanya satu operator yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi komunikasi di Desa Pinggirpapas. Kontrol terhadap proses implementasi dan para operator yang dilakukan oleh Kepala Desa Pinggirpapas belum maksimal, kontrol hanya dilakukan sebatas laporan terkait apa yang dilakukan dan terkait data yang di imput ke *website* DIGDAYA.

e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Keterlibatan masyarakat Desa Pinggirpapas dalam implementasi *smart governnace* belum ada. Pemetaan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh para operator terkait *smart governance* di Desa Pinggirpapas kurang maksimal, dikarenakan pemetaan sosial dan ekonomi dilakukan hanya sebatas berdasarkan data yang ada dan diterima oleh Pemerintah Desa.

f) Sikap pelaksana

Para pelaksana di Desa Pinggirpapas memiliki respon yang positif dengan menerima baik kebijakan *smart governance* yang akan di implementasikan di Desa Pinggirpapas. Serta komitmen yang dimiliki oleh para pelaksana cukup bagus untuk meningkatkan dan mengembangkan *website* DIGDAYA berdasarkan atas indikator dari *smart governance* serta arah pengembangan *smart governance* kedepannya di Desa Pinggirpapas.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti terkait Implementasi Kebijakan *Smart Governance* Dalam Mewujudkan Data Terintegrasi Desa di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yaitu sebagai berikut:

a) Standard (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

- Alangkah baiknya para operator di Desa Pinggirpapas untuk mampu meningkatkan pemahamannya tentang *smart governance* dan teknologi informasi komunikasi (TIK), bisa dengan mengikuti pendidikan dan berbagai pelatihan secara online ataupun offline yang disediakan oleh pihak-pihak lain. Seperti yang dissediakan oleh Pemerintah ataupun instansi-instansi pendidikan.
- Seharusnya Pemerintah Desa Pinggirpapas meningkatkan transparansi publik terkait *smart governance* dengan menyediakan berbagai informasi publik secara jelas dan terbaru di dalam *website*, agar masyarakat ikut terlibat dan mengetahui implementasi *smart governance* di Desa Pinggirpapas.
- Sebaiknya Pemerintah Desa Pinggirpapas mengembangkan program *smart governance* agar penggunaan TIK dalam pelayanan publik dapat diwujudkan, dengan cara memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan layanan mandiri yang di sediakan dalam *website* DIGDAYA
- Serta alangakah baiknya Pemerintah Desa Pinggirpapas mengembangkan *website* DIGDAYA menjadi sebuah aplikasi yang mudah di *download* melalui *smartphone* secara mandiri oleh masyarakat Desa Pinggirpapas, agar dapat lebih mudah di gunakan oleh masyarakat dan terwujudnya pengintegrasian data Desa di Desa pinggirpapas.

b) Sumber-sumber kebijakan
- Sebaiknya Pemerintah Desa Pinggirpapas meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program *smart governance*, dengan cara memilih orang bekualifikasi khusus dalam bidang IT.
- Alangkah baiknya Pemerintah Desa Pinggirpapas meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung yang dimiliki, seperti menyediakan komputer khusus yang dapat secara baik mengoperasikan yang bersangkutan dengan IT serta lebih mampu untuk menyediakan jaringan wifi yang lebih lancar dan cepat agar proses pengembangan dapat berjalan secara maksimal.

c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
- Sebaiknya Pemerintah Desa melakukan pengajuan sosialisasi kembali terkait kebijakan *smart governance* secara langsung

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

terhadap Pemerintah Daerah, agar dapat memahami dan mengetahui tentang kebijakan *smart governance* lebih jelas.

- Sebaiknya Pemerintah Desa Pinggirpapas melakukan pelatihan yang dapat secara maksimal meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pelaksana dengan menekankan pada cara pengoperasian *website* DIGDAYA serta penggunaan teknologi informasi komunikasi bagi para operator. Dan juga mendatangkan mentor yang cukup fasih dalah bidang teknologi informasi komunikasi, serta berkelahlian dalam bidang TIK ataupun sebuah *website*.
- Serta alangkah baiknya Pemerintah Desa Pinggirpapas melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, agar informasi tentang *smart governance* tersampaikan ke masyarakat dan dapat menarik dukungan serta pasrtisispasi masyarakat dalam implementasi *smart governance* di Desa Pinggirpapas.

d) Karakteristik badan pelaksana

- Sebaiknya Pemerintah Desa Pinggirpapas lebih meningkatkan keahlian para operator dalam bidang teknologi informasi komunikasi, dengan mengikutkan para operator ke berbagai pelatihan dan pendidikan yang bersangkutan dengan bidang teknologi informasi komunikasi. Serta memilih orang yang berkeahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- Serta alangkah baiknya Kepala Desa Pinggirpapas dapat mengontrol implementasi *smart governance* secara tegas dan baik, agar dalam implementasi *smart governance* dapat terjadi berbagai pengembangan-pengembangan yang lebih berkelanjutan untuk mampu mewujudkan pengintegrasian data desa, dan menjadikan Desa Pinggirpapas salah satu Desa cerdas di Kabupaten Sumenep

e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

- Seharusnya Pemerintah Desa mampu untuk melibatkan masyarakat dalam implementasi *smart governance* di Desa Pinggirpapas, agar dapat terimplementasi dengan baik.
- Serta sebaiknya para operator dapat melakukan pemetaan sosial dan ekonomi yang lebih maksimal

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

dan baik, misalkan dengan cara menemukan berbagai fakta sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat dengan malakukan pendekatan atau melakukan observasi secara turun langsung, agar pemetaan yang dilakukan dapat lebih maksimal dan akurat.

f) Sikap pelaksana

Diharapkan Pemerintah Desa untuk mampu mewujudkan dan memegang teguh komitmen yang telah dimiliki untuk implementasi *smart governance* di Desa Pinggirpapas kedepannya. Serta dapat secara maksimal melaksanakan komitmen yang telah dimiliki oleh para pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Duadji, N. T. dan N. (2017). *KEBIJAKAN PUBLIK TEORI DAN PRAKTEK MODEL-MODEL PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH* (1st ed.). Suluh Media.

Hermayanti, E. S., & Yuwono, T. (2020). Implementasi Green Smart Village di Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Desa Banyuanyar Kecamatan Ample Kabupaten Boyolali). *Jurnal Of Politic and Government Studies*, *02*, 121–130.

Indonesia, U. R. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA* (Issue 1).

Juliantoro, M. A., Nasution, R. D., Harsono, J., Dj, E. W., Studi, P., Pemerintahan, I., & Ponorogo, U. M. (2022). Penerapan Smart Village Di Wilayah Pinggiran Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *6*(2), 3717–3723. https://doi.org/10.36312

Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.

Maharani, E. N., & Kencono, D. S. (2021). PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM SMART VILLAGE DI KALURAHAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, *5*, 25–38.

Niken Paramarti Dasuki, dan S. N. S. (2021). *MODEL DESA-CERDAS-MANUSIAWI (HUMANIZED SMART- VILLAGE): STUDY KASUS DI DESA KOTAYASA DAN DESA KARANGGINTUNG , KECAMATAN SUMBANG , KABUPATEN*. 84–93. http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTSI%0APENERAPAN

Nolesa, R. (2021). *Aplikasi Digdaya Inovasi Baru Bupati Fauzi*. Nolesa. https://www.google.co.id/url?q=https://nolesa.com/aplikasi-digdaya-inovasi-baru-bupati-

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

fauzi/&sa=U&ved=2ahUKEwjwgJfv6_r6AhWhAbcAHSPtB-A4ChAWegQIABAC&usg=AOvVaw3ILIFWkCps426hsupWpp4w

Pers, S. (2017). *Smart Village: Desa Maju, Desa Bahagia*. PPID. http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3509/smart-village-desa-maju-desa-bahagia

Pinggirpapas, D. (2021). *RPJM Desa Pinggirpapas Tahun 2021 - 2026 | 11*. 11–34.

Santoso, A. D., Fathin, C. A., Effendi, K. C., Novianto, A., Sumiar, H. R., Angendari, D. A. D., & Putri, B. P. (2018). *DESA CERDAS : TRANSFORMASI KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN DESA MERESPON ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0* (D. E. A. Purwanto & D. D. Permad (eds.)). Center for Digital Society Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli.

Sugiyono. (2020). *METODE PEBELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.

Sumenep, P. B. (2021). *PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DATA INTEGRASI DESA BERDAYA (DIGDAYA) DI KABUPATEN SUMENEP*.

Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (F. Zulhendri (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.

Way, H., Wuisang, C. E. V, Sondakh, J. A. R., Teknik, F., Ratulangi, U. S., Teknik, F., Ratulangi, U. S., & Manado, K. (2022). *EVALUASI PENERAPAN KONSEP KELURAHAN CERDAS (SMART VILLAGE) DI KOTA MANADO*. *19*(2), 57–68.